Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2026, Page: 33444-33454

Optimalisasi Ekologi Pemerintahan dalam Mendukung Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menuju Tata Kelola Wilayah Berkelanjutan

Alfira Zahra[1], Nur Handayani[2]

[1,2] Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah, Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Sumedang, Indonesia

Email Korespondensi: alfirazahraa07@gmail.com

Published: Juni, 2026

ABSTRAK

Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada era desentralisasi menghadapi berbagai tantangan yang berasal dari dinamika lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan geografis yang terus berkembang. Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi agar mampu menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif sekaligus mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran optimalisasi ekologi pemerintahan dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah menuju tata kelola wilayah berkelanjutan. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan (*library research*). Data diperoleh dari berbagai sumber literatur berupa jurnal ilmiah, buku, dan publikasi akademik yang relevan dengan ekologi pemerintahan, geografi pemerintahan, tata kelola pemerintahan daerah, dan pembangunan berkelanjutan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui proses pengumpulan, reduksi, interpretasi, dan sintesis literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekologi pemerintahan berperan penting dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui penguatan kapasitas internal organisasi, peningkatan kemampuan adaptasi terhadap lingkungan eksternal, serta pengembangan kebijakan yang lebih responsif terhadap karakteristik wilayah. Selain itu, ekologi pemerintahan juga mendukung terwujudnya tata kelola wilayah berkelanjutan melalui penerapan prinsip keberlanjutan, partisipasi masyarakat, perlindungan lingkungan, dan integrasi pembangunan ekonomi, sosial, serta ekologis. Oleh karena itu, optimalisasi ekologi pemerintahan dapat menjadi strategi penting dalam memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang adaptif, efektif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Ekologi Pemerintahan; Pemerintahan Daerah; Geografi Pemerintahan; Tata Kelola Wilayah; Pembangunan Berkelanjutan.

ABSTRACT

Regional governance in the decentralization era faces various challenges arising from evolving social, economic, political, and geographical dynamics. These conditions require local governments to possess strong adaptive capacities in order to effectively perform governmental functions while promoting sustainable development. This study aims to analyze the role of optimizing governmental ecology in supporting the effectiveness of local governance toward sustainable territorial governance. The research employed a descriptive method with a qualitative approach through library research. Data were collected from various sources, induding scientific journals, books, and academic publications related to governmental ecology, governmental geography, local governance, and sustainable development. Data analysis was conducted using descriptive qualitative techniques through literature collection, reduction, interpretation, and synthesis. The findings reveal that governmental ecology plays a significant role in enhancing the effectiveness of local governance by strengthening organizational capacity, improving adaptability to external environmental changes, and fostering policies that are more responsive to regional characteristics. Furthermore, governmental ecology contributes to the realization of sustainable territorial governance through the implementation of sustainability principles, community participation, environmental protection, and the integration of economic, social, and ecological development. Therefore, the optimization of governmental ecology can serve as an important strategy for strengthening adaptive, effective, and sustainable local governance.

Keywords: Governmental Ecology; Local Governance; Governmental Geography; Territorial Governance; Sustainable Development.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada era desentralisasi menghadapi tantangan yang semakin kompleks akibat dinamika lingkungan strategis yang terus berkembang. Globalisasi, kemajuan teknologi informasi, perubahan sosial masyarakat, tuntutan pelayanan publik yang semakin tinggi, serta isu pembangunan berkelanjutan menuntut pemerintah daerah untuk mampu beradaptasi secara efektif terhadap perubahan lingkungan yang terjadi. Dalam konteks tersebut, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan tidak lagi hanya ditentukan oleh kapasitas internal organisasi pemerintah, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan eksternal yang melingkupinya. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang mampu menjelaskan hubungan timbal balik antara pemerintah dengan lingkungannya secara komprehensif, yaitu melalui perspektif ekologi pemerintahan.

Ekologi pemerintahan merupakan suatu pendekatan yang memandang pemerintah sebagai sistem yang hidup dan berinteraksi secara dinamis dengan lingkungan internal maupun eksternal. Pendekatan ini menekankan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam menyesuaikan diri terhadap berbagai faktor lingkungan yang memengaruhi proses pemerintahan. Lingkungan internal meliputi sumber daya manusia, struktur organisasi, budaya birokrasi, kepemimpinan, dan sistem administrasi pemerintahan. Sementara itu, lingkungan eksternal mencakup kondisi sosial, ekonomi, politik, budaya, demografi, serta karakteristik geografis wilayah yang menjadi ruang lingkup penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, pemerintah tidak dapat dipahami sebagai organisasi yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari suatu sistem yang saling berhubungan dengan berbagai unsur lingkungan.

Dalam perspektif ilmu pemerintahan, konsep ekologi pemerintahan menjadi semakin relevan karena mampu menjelaskan bagaimana faktor lingkungan memengaruhi efektivitas kebijakan dan kinerja pemerintahan daerah. Hasibuan (2019) menjelaskan bahwa ekologi pemerintahan memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing kebijakan pemerintah daerah. Kebijakan yang disusun dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan geografis akan lebih mampu menjawab kebutuhan masyarakat dibandingkan kebijakan yang disusun secara normatif tanpa mempertimbangkan karakteristik wilayah. Oleh karena itu, pemahaman terhadap lingkungan pemerintahan menjadi faktor penting dalam menghasilkan kebijakan yang efektif dan berorientasi pada kepentingan publik.

Perkembangan lingkungan strategis yang semakin dinamis juga menuntut pemerintah daerah untuk memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi. Perubahan kebutuhan masyarakat, perkembangan teknologi digital, serta meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik mendorong pemerintah untuk terus melakukan inovasi dalam tata kelola pemerintahan. Dalam kondisi tersebut, pendekatan ekologi pemerintahan dapat menjadi instrumen penting untuk membantu pemerintah memahami berbagai faktor yang memengaruhi proses penyelenggaraan pemerintahan. Putra (2024) menyatakan bahwa ekologi pemerintahan memberikan kontribusi signifikan dalam mewujudkan kebijakan pemerintah daerah yang berdaya saing. Kemampuan pemerintah dalam membaca peluang dan tantangan lingkungan akan menentukan kualitas kebijakan yang dihasilkan serta efektivitas implementasinya di lapangan.

Selain berpengaruh terhadap kebijakan publik, pendekatan ekologi pemerintahan juga memiliki keterkaitan erat dengan reformasi birokrasi yang saat ini menjadi agenda utama pemerintah. Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang profesional, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Namun demikian, keberhasilan reformasi birokrasi

tidak hanya bergantung pada perubahan struktur organisasi dan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan birokrasi dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan. Relianti (2025) menjelaskan bahwa perspektif ekologi administrasi negara memberikan pendekatan kontekstual dalam reformasi birokrasi dengan menempatkan lingkungan sebagai faktor yang memengaruhi perilaku dan kinerja organisasi pemerintahan. Oleh karena itu, birokrasi yang efektif adalah birokrasi yang mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan tanpa kehilangan fungsi utamanya sebagai pelaksana pelayanan publik dan pembangunan.

Dalam konteks pembangunan daerah, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan juga berkaitan erat dengan kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya wilayah secara berkelanjutan. Pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan aspek lingkungan berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan di masa depan, seperti kerusakan lingkungan, ketimpangan sosial, dan menurunnya kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, konsep pembangunan berkelanjutan menjadi salah satu paradigma penting dalam tata kelola pemerintahan modern. Pemerintah daerah dituntut untuk mampu menyeimbangkan kepentingan pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan dalam setiap kebijakan yang diambil. Pentingnya integrasi antara pemerintahan dan lingkungan hidup tercermin dalam konsep good environmental governance. Konsep ini menekankan bahwa pengelolaan lingkungan harus dilakukan melalui prinsip-prinsip tata kelola yang baik, seperti transparansi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, efektivitas, dan keberlanjutan. Redin (2020) menjelaskan bahwa penerapan prinsip good environmental governance oleh pemerintah daerah dapat meningkatkan efektivitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Keberhasilan pengelolaan lingkungan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam membangun kolaborasi dengan masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan harmonis antara pemerintah dan lingkungan menjadi faktor penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Dari sudut pandang geografi pemerintahan, setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda sehingga memerlukan pendekatan pemerintahan yang berbeda pula. Perbedaan kondisi geografis, kepadatan penduduk, tingkat pembangunan, sumber daya alam, serta karakteristik sosial budaya menyebabkan kebutuhan masyarakat pada setiap daerah tidak selalu sama. Oleh karena itu, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam memahami kondisi wilayah yang menjadi objek pemerintahannya. Rochaeni (2023) menjelaskan bahwa ekologi pemerintahan merupakan paradigma yang menempatkan lingkungan wilayah sebagai salah satu faktor utama dalam sistem pemerintahan daerah. Melalui pendekatan ini, pemerintah dapat menyusun kebijakan yang lebih kontekstual, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Meskipun konsep ekologi pemerintahan telah banyak dibahas dalam kajian ilmu pemerintahan, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek kebijakan publik, reformasi birokrasi, atau tata kelola lingkungan secara terpisah. Kajian yang mengintegrasikan dimensi lingkungan internal pemerintahan, lingkungan eksternal, dan tata kelola wilayah berkelanjutan masih relatif terbatas. Padahal, ketiga aspek tersebut saling berkaitan dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah yang memiliki kapasitas internal yang baik namun tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan eksternal akan mengalami kesulitan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah secara optimal.

Berdasarkan kondisi tersebut, kajian mengenai optimalisasi ekologi pemerintahan menjadi penting untuk dilakukan. Pendekatan ini tidak hanya memberikan pemahaman mengenai hubungan antara pemerintah dan lingkungannya, tetapi juga menawarkan kerangka analisis dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui optimalisasi faktor-faktor ekologis, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat kapasitas kelembagaan, menghasilkan kebijakan yang lebih responsif, serta mendorong terciptanya tata kelola wilayah yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi ekologi pemerintahan dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah menuju tata kelola wilayah berkelanjutan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan ilmu geografi pemerintahan dan ekologi pemerintahan, sekaligus menjadi

referensi praktis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan.

TINJAUAN PUSTAKA

Ekologi Pemerintahan

Ekologi pemerintahan merupakan salah satu pendekatan dalam ilmu pemerintahan yang mempelajari hubungan timbal balik antara sistem pemerintahan dengan lingkungan yang memengaruhinya. Pendekatan ini berangkat dari pemahaman bahwa pemerintahan tidak dapat dipisahkan dari konteks lingkungan tempat pemerintahan tersebut berlangsung. Lingkungan yang dimaksud mencakup aspek sosial, ekonomi, politik, budaya, demografi, maupun kondisi geografis wilayah. Oleh karena itu, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam memahami dan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan yang terjadi. Konsep ekologi pemerintahan berkembang dari pemikiran ekologi administrasi yang diperkenalkan oleh Riggs, yang menekankan bahwa organisasi pemerintahan selalu dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sekitarnya. Dalam perkembangannya, konsep tersebut diadaptasi ke dalam kajian ilmu pemerintahan untuk menjelaskan bagaimana lingkungan memengaruhi proses pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan, serta kualitas pelayanan publik. Rochaeni (2023) menjelaskan bahwa ekologi pemerintahan merupakan paradigma yang menempatkan lingkungan sebagai elemen penting dalam sistem pemerintahan daerah. Melalui perspektif ini, pemerintah dipandang sebagai bagian dari suatu sistem yang saling berinteraksi dengan berbagai unsur lingkungan sehingga keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh faktor internal organisasi, tetapi juga oleh kondisi eksternal yang melingkupinya.

Dalam praktiknya, ekologi pemerintahan dapat dibedakan menjadi lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal mencakup sumber daya manusia, kepemimpinan, struktur organisasi, budaya kerja, serta kapasitas kelembagaan pemerintah. Sementara itu, lingkungan eksternal meliputi masyarakat, kondisi sosial ekonomi, perkembangan teknologi, karakteristik geografis, serta dinamika politik yang berkembang di suatu wilayah. Hubungan yang harmonis antara kedua lingkungan tersebut akan menentukan kemampuan pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan dan pelayanan publik secara efektif. Hasibuan (2019) menegaskan bahwa ekologi pemerintahan memiliki peran strategis dalam meningkatkan daya saing kebijakan pemerintah daerah. Pemahaman terhadap karakteristik lingkungan memungkinkan pemerintah menghasilkan kebijakan yang lebih kontekstual, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, ekologi pemerintahan tidak hanya berfungsi sebagai pendekatan teoritis, tetapi juga sebagai instrumen praktis dalam memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan tingkat keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi tersebut meliputi pelayanan publik, pembangunan daerah, pemberdayaan masyarakat, serta pelaksanaan berbagai kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan yang efektif ditandai dengan kemampuan organisasi pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya secara optimal sehingga mampu menghasilkan pelayanan dan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam konteks otonomi daerah, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Efektivitas tidak hanya diukur melalui pencapaian target program, tetapi juga melalui kemampuan pemerintah dalam merespons kebutuhan masyarakat secara cepat, tepat, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan berkaitan erat dengan kapasitas kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, sistem administrasi, serta kemampuan pemerintah dalam membangun koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Perspektif ekologi pemerintahan menjelaskan bahwa efektivitas penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dipisahkan dari kondisi lingkungan yang memengaruhi organisasi pemerintahan. Relianti (2025) menyatakan bahwa lingkungan merupakan faktor penting yang

menentukan keberhasilan reformasi birokrasi dan kinerja organisasi pemerintah. Pemerintah yang mampu memahami perubahan lingkungan akan lebih mudah menyesuaikan kebijakan, prosedur kerja, dan strategi pelayanan sehingga mampu mempertahankan efektivitas organisasi dalam menghadapi berbagai tantangan. Selain itu, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan juga dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam membangun hubungan yang baik dengan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan dapat meningkatkan legitimasi pemerintah sekaligus memperkuat kualitas kebijakan yang dihasilkan. Dengan demikian, efektivitas pemerintahan tidak hanya bergantung pada faktor administratif, tetapi juga pada kualitas interaksi antara pemerintah dan lingkungan sosial yang menjadi bagian dari sistem pemerintahan.

Tata Kelola Wilayah Berkelanjutan dalam Perspektif Ekologi Pemerintahan

Tata kelola wilayah berkelanjutan merupakan suatu pendekatan dalam pengelolaan wilayah yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Konsep ini muncul sebagai respons terhadap berbagai permasalahan pembangunan yang sering kali berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata tanpa memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Dalam paradigma pembangunan berkelanjutan, pemerintah memiliki peran penting sebagai aktor utama yang bertanggung jawab dalam mengintegrasikan berbagai kepentingan pembangunan secara seimbang. Pendekatan ekologi pemerintahan memberikan landasan teoritis yang kuat dalam mewujudkan tata kelola wilayah berkelanjutan. Melalui perspektif ini, pemerintah dipandang sebagai bagian dari sistem ekologis wilayah yang harus mampu menjaga keseimbangan hubungan antara manusia, lingkungan, dan aktivitas pembangunan. Pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator yang mampu membangun kolaborasi dengan masyarakat, sektor swasta, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Redin (2020) menjelaskan bahwa penerapan prinsip *good environmental governance* menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan tata kelola wilayah berkelanjutan. Prinsip-prinsip tersebut meliputi partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan keberlanjutan dalam proses pengambilan keputusan. Melalui penerapan prinsip tersebut, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga menjaga kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Putra (2024) menjelaskan bahwa ekologi pemerintahan berkontribusi dalam menciptakan kebijakan daerah yang berdaya saing melalui kemampuan pemerintah dalam memahami kondisi lingkungan yang berkembang. Kebijakan yang disusun berdasarkan karakteristik wilayah akan lebih mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Dalam perspektif geografi pemerintahan, setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda sehingga memerlukan strategi tata kelola yang berbeda pula. Oleh karena itu, tata kelola wilayah berkelanjutan harus mempertimbangkan kondisi geografis, potensi sumber daya, serta karakteristik sosial masyarakat agar pembangunan dapat berlangsung secara efektif dan berkelanjutan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa tata kelola wilayah berkelanjutan merupakan hasil dari interaksi yang harmonis antara sistem pemerintahan dan lingkungan wilayah. Optimalisasi ekologi pemerintahan akan memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya wilayah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan. Dengan demikian, pendekatan ekologi pemerintahan menjadi salah satu kerangka penting dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah menuju tata kelola wilayah yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif dipilih karena penelitian bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis secara mendalam konsep ekologi pemerintahan serta perannya dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah menuju tata kelola wilayah berkelanjutan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami berbagai fenomena pemerintahan yang terjadi melalui kajian teoritis dan analisis terhadap berbagai sumber ilmiah yang relevan. Jenis

penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan ekologi pemerintahan, geografi pemerintahan, tata kelola pemerintahan daerah, pembangunan berkelanjutan, serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Sumber data penelitian terdiri atas data sekunder yang diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, buku, prosiding, laporan penelitian, dokumen kebijakan, dan berbagai publikasi akademik yang memiliki relevansi dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi. Peneliti mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengkaji berbagai referensi yang membahas konsep ekologi pemerintahan serta implementasinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Literatur yang digunakan diprioritaskan berasal dari sumber-sumber ilmiah yang kredibel dan memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian, baik dari jurnal nasional maupun internasional. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Data yang telah terkumpul selanjutnya direduksi, diklasifikasikan, dan disusun berdasarkan tema-tema utama penelitian, yaitu konsep ekologi pemerintahan, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta tata kelola wilayah berkelanjutan. Setelah itu, data dianalisis melalui proses interpretasi dan sintesis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara ekologi pemerintahan dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tahapan analisis dimulai dengan mengidentifikasi berbagai konsep dan teori yang relevan dari literatur yang digunakan. Selanjutnya, dilakukan pengelompokan informasi berdasarkan fokus pembahasan untuk menemukan pola keterkaitan antarvariabel yang diteliti. Tahap akhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan hasil interpretasi terhadap berbagai temuan yang diperoleh dari literatur. Melalui proses tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang sistematis mengenai pentingnya optimalisasi ekologi pemerintahan dalam mendukung tata kelola wilayah yang efektif, adaptif, dan berkelanjutan. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif berbasis studi kepustakaan, penelitian ini berupaya menghasilkan pemahaman konseptual yang lebih mendalam mengenai ekologi pemerintahan sebagai salah satu pendekatan dalam ilmu pemerintahan dan geografi pemerintahan yang dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan lingkungan wilayah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Optimalisasi Ekologi Pemerintahan dalam Meningkatkan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan salah satu indikator utama keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintahan yang efektif ditandai oleh kemampuan pemerintah dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta menjaga stabilitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Namun demikian, efektivitas tersebut tidak hanya ditentukan oleh kualitas birokrasi atau kemampuan aparatur pemerintah semata, melainkan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan yang mengelilingi sistem pemerintahan. Dalam perspektif ekologi pemerintahan, pemerintah dipandang sebagai suatu sistem terbuka yang terus berinteraksi dengan lingkungan internal maupun eksternal sehingga keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan sangat dipengaruhi oleh kemampuan adaptasi terhadap lingkungan tersebut. Pendekatan ekologi pemerintahan menempatkan lingkungan sebagai faktor strategis yang menentukan kualitas tata kelola pemerintahan. Lingkungan internal meliputi kapasitas sumber daya manusia, kepemimpinan, struktur organisasi, budaya kerja, serta mekanisme koordinasi birokrasi. Sementara itu, lingkungan eksternal meliputi kondisi sosial masyarakat, perkembangan ekonomi, dinamika politik, kemajuan teknologi, serta karakteristik geografis wilayah. Interaksi yang harmonis antara kedua lingkungan tersebut akan menciptakan pemerintahan yang lebih responsif, adaptif, dan mampu menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks geografi pemerintahan, hubungan antara pemerintah dan lingkungan menjadi semakin penting karena setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda. Perbedaan kondisi geografis, demografis, sosial, dan ekonomi menyebabkan kebutuhan serta tantangan pemerintahan di setiap daerah tidak selalu sama. Oleh karena itu, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan sangat

ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam memahami karakteristik lingkungan wilayah yang menjadi objek pemerintahannya. Untuk memahami bagaimana peran ekologi pemerintahan dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dilakukan sintesis terhadap beberapa penelitian yang relevan sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Sintesis Literatur mengenai Peran Ekologi Pemerintahan terhadap Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Peneliti	Fokus Kajian	Temuan Utama	Implikasi terhadap Efektivitas Pemerintahan
1	Wasistiono (2013)	Ekologi pemerintahan	Pemerintah dipengaruhi lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan geografis	Adaptasi lingkungan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan
2	Cahyadi (2020)	Ekologi pemerintahan	Hubungan pemerintah dan lingkungan menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatkan kemampuan pemerintah menghadapi perubahan lingkungan
3	Nafsi et al. (2021)	Pemerintah sebagai sistem	Pemerintah merupakan sistem yang saling berhubungan dengan lingkungan	Efektivitas tercapai melalui sinergi antar subsistem pemerintahan
4	Hasibuan (2019)	Daya saing kebijakan daerah	Kebijakan daerah harus disusun berdasarkan karakteristik lingkungan	Kebijakan menjadi lebih responsif dan tepat sasaran
5	Putra (2024)	Kebijakan pemerintah daerah berdaya saing	Ekologi pemerintahan mendorong inovasi kebijakan publik	Meningkatkan kualitas pelayanan dan daya saing daerah
6	Relianti (2025)	Reformasi birokrasi	Lingkungan memengaruhi keberhasilan reformasi birokrasi	Meningkatkan kapasitas organisasi pemerintahan
7	Mozin et al. (2025)	Kebijakan ekonomi berkelanjutan	Adaptasi lingkungan memperkuat pembangunan daerah	Meningkatkan sinkronisasi pembangunan dan tata kelola daerah

Sumber: Diolah penulis (2026).

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa seluruh penelitian menempatkan lingkungan sebagai faktor yang memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Temuan ini menunjukkan bahwa pemerintahan tidak dapat dipisahkan dari kondisi lingkungan yang melingkupinya. Efektivitas pemerintahan lahir dari kemampuan pemerintah dalam memahami perubahan lingkungan sekaligus menyesuaikan kebijakan dan strategi penyelenggaraan pemerintahan dengan kondisi yang berkembang. Kajian Wasistiono (2013) dan Cahyadi (2020) menunjukkan bahwa hubungan antara pemerintah dan lingkungan merupakan inti dari ekologi pemerintahan. Pemerintah yang mampu memahami karakteristik lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan geografis cenderung memiliki kemampuan yang lebih baik dalam merumuskan kebijakan publik. Sebaliknya, ketidaksesuaian antara kebijakan dan kondisi lingkungan sering kali menjadi penyebab rendahnya efektivitas program pemerintah. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh aspek administratif, tetapi juga oleh kemampuan membaca kondisi wilayah secara komprehensif.

Selanjutnya, Nafsi et al. (2021) menjelaskan bahwa pemerintah merupakan suatu sistem yang terdiri atas berbagai subsistem yang saling berhubungan. Perspektif ini memperlihatkan bahwa

efektivitas penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dicapai melalui perbaikan parsial, melainkan harus dilakukan secara menyeluruh. Kualitas sumber daya manusia, kepemimpinan, struktur organisasi, koordinasi antarinstansi, serta dukungan masyarakat harus berjalan secara sinergis agar tujuan pemerintahan dapat tercapai secara optimal. Hasil kajian Hasibuan (2019) dan Putra (2024) menunjukkan bahwa pemahaman terhadap lingkungan daerah mampu meningkatkan kualitas kebijakan publik. Pemerintah yang memahami kondisi sosial dan geografis wilayahnya akan lebih mudah menghasilkan kebijakan yang adaptif, inovatif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam perspektif geografi pemerintahan, hal ini menjadi sangat penting karena setiap wilayah memiliki karakteristik yang unik sehingga membutuhkan pendekatan kebijakan yang berbeda.

Temuan Mozin et al. (2025) dan Relianti (2025) memperkuat argumentasi bahwa kemampuan adaptasi terhadap lingkungan merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan modern. Pemerintah daerah yang mampu mengintegrasikan perubahan lingkungan ke dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan akan lebih siap menghadapi tantangan pembangunan, sekaligus meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan secara keseluruhan. Dengan demikian, hasil kajian menunjukkan bahwa optimalisasi ekologi pemerintahan merupakan faktor strategis dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hubungan yang harmonis antara lingkungan internal dan eksternal memungkinkan pemerintah menghasilkan kebijakan yang lebih responsif, memperkuat kapasitas birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Peran Ekologi Pemerintahan dalam Mewujudkan Tata Kelola Wilayah Berkelanjutan

Pembangunan wilayah pada era modern tidak lagi hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Perubahan paradigma pembangunan tersebut melahirkan konsep tata kelola wilayah berkelanjutan (*sustainable territorial governance*) yang menempatkan pemerintah sebagai aktor utama dalam mengintegrasikan berbagai kepentingan pembangunan secara harmonis. Dalam konteks ini, ekologi pemerintahan menjadi pendekatan yang relevan karena menekankan pentingnya hubungan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, dan lingkungan dalam mencapai tujuan pembangunan jangka panjang. Konsep tata kelola wilayah berkelanjutan berangkat dari pemahaman bahwa wilayah merupakan suatu sistem yang kompleks dan dinamis. Wilayah tidak hanya terdiri atas unsur fisik berupa ruang geografis, tetapi juga mencakup berbagai aktivitas sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang saling berinteraksi. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan wilayah sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam mengelola berbagai hubungan tersebut secara seimbang. Pendekatan ekologi pemerintahan memberikan landasan konseptual untuk memahami bagaimana pemerintah dapat menjalankan fungsi pengaturan, pelayanan, dan pembangunan tanpa mengabaikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk memahami kontribusi ekologi pemerintahan dalam mewujudkan tata kelola wilayah berkelanjutan, dilakukan sintesis terhadap beberapa penelitian yang relevan sebagaimana disajikan pada Tabel 2

Tabel 2. Sintesis Literatur tentang Ekologi Pemerintahan dan Tata Kelola Wilayah Berkelanjutan

No	Peneliti	Fokus Kajian	Temuan Utama	Kontribusi terhadap Tata Kelola Berkelanjutan
1	Purniawati et al. (2020)	Good Environmental Governance	Tata kelola lingkungan memerlukan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas	Memperkuat pembangunan berkelanjutan berbasis lingkungan
2	Armstrong & Li (2022)	Governance and Sustainability	Tata kelola lokal berpengaruh terhadap keberhasilan	Meningkatkan integrasi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan

			pembangunan berkelanjutan	
3	Čičmancová (2024)	Sustainability of Local Governments	Pemerintah lokal berkelanjutan memiliki kapasitas tata kelola yang lebih baik	Memperkuat ketahanan pembangunan wilayah
4	Kalidoss & Ghate (2025)	Local Governance and Sustainability	Tata kelola lokal berpengaruh terhadap perlindungan lingkungan dan adaptasi iklim	Mendukung keberlanjutan wilayah jangka panjang
5	Hawkins & Wang (2011)	Citizen Participation	Partisipasi masyarakat meningkatkan efektivitas pembangunan berkelanjutan	Memperkuat legitimasi dan keberhasilan kebijakan
6	Wang et al. (2023)	Environmental Governance and Innovation	Kebijakan lingkungan mendorong inovasi teknologi daerah	Mendukung pengelolaan wilayah yang lebih efektif
7	Mozin et al. (2025)	Kebijakan Ekonomi Berkelanjutan	Adaptasi lingkungan mendukung pembangunan ekonomi daerah	Menyeimbangkan pembangunan dan kelestarian lingkungan

Sumber: Diolah penulis (2026).

Berdasarkan Tabel 2, terlihat bahwa tata kelola wilayah berkelanjutan tidak dapat dipisahkan dari kualitas hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan lingkungan. Seluruh penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan berkelanjutan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam mengintegrasikan berbagai aspek pembangunan ke dalam proses pengambilan keputusan. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa pemerintah tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator yang menghubungkan berbagai kepentingan pembangunan secara seimbang. Kajian Purniawati et al. (2020) menunjukkan bahwa penerapan prinsip *good environmental governance* menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola wilayah yang berkelanjutan. Prinsip-prinsip seperti transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan efektivitas memungkinkan pemerintah menjalankan pembangunan secara lebih bertanggung jawab. Dalam perspektif ekologi pemerintahan, prinsip tersebut mencerminkan adanya hubungan yang harmonis antara pemerintah dan lingkungan sebagai dasar keberlanjutan pembangunan wilayah.

Temuan Armstrong dan Li (2022) menunjukkan bahwa keberhasilan tata kelola pemerintahan lokal sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara bersamaan. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak dapat dicapai melalui pendekatan sektoral yang terpisah-pisah. Sebaliknya, diperlukan pendekatan holistik yang mampu melihat wilayah sebagai satu kesatuan sistem yang saling berhubungan. Perspektif ini sejalan dengan konsep ekologi pemerintahan yang menempatkan pemerintah sebagai bagian dari ekosistem pembangunan daerah. Hasil penelitian Čičmancová (2024) menunjukkan bahwa pemerintah lokal yang menerapkan prinsip keberlanjutan secara konsisten memiliki kapasitas tata kelola yang lebih baik dibandingkan pemerintah yang masih berorientasi pada target pembangunan jangka pendek. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan bukan hanya tujuan pembangunan, tetapi juga menjadi indikator kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Semakin baik kualitas tata kelola pemerintahan, semakin besar pula kemampuan daerah dalam menjaga stabilitas pembangunan jangka panjang.

Selain itu, Kalidoss dan Ghate (2025) menemukan bahwa kualitas tata kelola lokal memiliki pengaruh signifikan terhadap perlindungan lingkungan dan kemampuan daerah dalam beradaptasi

terhadap perubahan iklim. Temuan ini menjadi sangat relevan dalam konteks Indonesia yang menghadapi berbagai tantangan lingkungan, seperti degradasi lahan, pencemaran lingkungan, banjir, serta perubahan iklim. Pemerintah daerah yang mampu mengelola hubungan antara pembangunan dan lingkungan secara seimbang akan memiliki kapasitas yang lebih baik dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut. Aspek partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penting dalam tata kelola wilayah berkelanjutan. Hawkins dan Wang (2011) menjelaskan bahwa keberhasilan pembangunan berkelanjutan sangat dipengaruhi oleh tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Partisipasi masyarakat tidak hanya meningkatkan legitimasi kebijakan, tetapi juga memperkuat pengawasan publik terhadap pelaksanaan program pembangunan. Dalam perspektif ekologi pemerintahan, masyarakat merupakan bagian integral dari lingkungan eksternal yang memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan.

Di sisi lain, perkembangan teknologi turut memperkuat implementasi tata kelola wilayah berkelanjutan. Wang et al. (2023) menemukan bahwa kebijakan lingkungan yang dirancang pemerintah mampu mendorong lahirnya inovasi teknologi yang mendukung pengelolaan sumber daya secara lebih efisien. Temuan ini menunjukkan bahwa hubungan antara pemerintahan, teknologi, dan lingkungan menjadi semakin penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan pada era digital. Secara keseluruhan, hasil kajian menunjukkan bahwa ekologi pemerintahan berperan sebagai fondasi konseptual dalam mewujudkan tata kelola wilayah berkelanjutan. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah memahami hubungan yang kompleks antara pembangunan, masyarakat, dan lingkungan sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan sosial dan ekologis. Dengan demikian, optimalisasi ekologi pemerintahan menjadi strategi penting bagi pemerintah daerah dalam menciptakan tata kelola wilayah yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan di tengah berbagai tantangan pembangunan abad ke-21.

KESIMPULAN

Ekologi pemerintahan merupakan pendekatan yang menempatkan pemerintah sebagai bagian dari suatu sistem yang senantiasa berinteraksi dengan lingkungan internal maupun eksternal. Hasil kajian menunjukkan bahwa efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak hanya ditentukan oleh kapasitas birokrasi, kualitas sumber daya manusia, dan struktur organisasi pemerintahan, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam memahami serta menyesuaikan diri terhadap dinamika lingkungan sosial, ekonomi, politik, budaya, dan geografis wilayah. Optimalisasi ekologi pemerintahan memungkinkan pemerintah daerah menghasilkan kebijakan yang lebih adaptif, responsif, dan sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan masyarakat sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja pemerintahan secara keseluruhan.

Selain berkontribusi terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, ekologi pemerintahan juga memiliki peran strategis dalam mewujudkan tata kelola wilayah yang berkelanjutan. Pendekatan ini mendorong pemerintah untuk mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam setiap proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Melalui penerapan prinsip tata kelola yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada keberlanjutan, pemerintah daerah dapat menciptakan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan pelestarian lingkungan. Oleh karena itu, optimalisasi ekologi pemerintahan menjadi salah satu fondasi penting dalam memperkuat kapasitas pemerintahan daerah untuk mewujudkan tata kelola wilayah yang efektif, adaptif, inklusif, dan berkelanjutan di tengah berbagai tantangan pembangunan kontemporer.

REFERENCES

Armstrong, A., & Li, Y. (2022). Governance and Sustainability in Local Government. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal, 16*(2), 12–30. https://doi.org/10.14453/aabfj.v16i2.2

Cahyadi, R. (2020). *Ekologi Pemerintahan*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Čičmancová, E. (2024). The Sustainability of Local Governments: Evidence from Municipal Governance Practices. *Sustainability, 16*(17), 7310. https://doi.org/10.3390/su16177310

Hasibuan, A. S. (2019). Peranan Ekologi Pemerintahan dalam Meningkatkan Daya Saing Kebijakan Pemerintah Daerah. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan, 2*(1), 33–47. https://doi.org/10.33701/jkp.v2i1.916

Hawkins, C. V., & Wang, X. (2011). Sustainable Development Governance: Citizen Participation and Support Networks in Local Sustainability Initiatives. *Public Works Management & Policy, 17*(1), 7–29. https://doi.org/10.1177/1087724X11429045

Kalidoss, D., & Ghate, A. D. (2025). Examining the Effect of Local Governance on Municipal Sustainability, Environmental Protection, and Climate Adaptation. *Lex Localis*. https://doi.org/10.52152/

Mozin, S. Y., Tantu, R., & Halid, I. J. (2025). Ekologi Administrasi dalam Kebijakan Ekonomi Berkelanjutan: Studi Kasus Pemerintah Daerah Gorontalo. *Jurnal Manajemen Bisnis dan Kewirausahaan, 5*(3), 314–324. https://doi.org/10.55606/jumbiku.v5i3.6070

Nafsi, N. D., Azizah, N., Fajriyanti, N., & Herabudin. (2021). Pemerintah sebagai Sebuah Sistem dalam Kajian Ekologi. *Jurnal Inovasi Penelitian, 1*(11), 2479–2484.

Purniawati, E., dkk. (2020). Good Environmental Governance in Indonesia: Perspective of Environmental Protection and Management. *Indonesian Journal of International Clinical Legal Education, 2*(1), 43–56. https://doi.org/10.15294/ijicle.v2i1.37328

Putra, B. K. (2024). Kontribusi Ekologi Pemerintahan untuk Mewujudkan Kebijakan Pemerintah Daerah yang Berdaya Saing. *Publika*. https://doi.org/10.33603/publika.v12i2.8567

Redin. (2020). Penerapan Prinsip Good Environmental Governance oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Perahu, 7*(2). https://doi.org/10.51826/.v7i2.390

Relianti, A. (2025). Perspektif Ekologi Administrasi Negara: Sebuah Pendekatan Kontekstual dalam Reformasi Birokrasi. *Jurnal Riset Politik dan Administrasi*.

Rochaeni, A. (2023). Ekologi Pemerintahan: Konsep dan Paradigma dalam Sistem Pemerintahan Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.

Wang, X., dkk. (2023). Environmental Governance Goals of Local Governments and Technological Innovation. *Sustainability, 15*. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9915408/

Wasistiono, S. (2013). *Pengantar Ekologi Pemerintahan*. Jakarta: IPDN Press.